

<p>Peluang (Opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respon pasar terhadap produk • Pesaing dari luar sedikit • Struktur harga yang stabil • Kredit bagi produsen • Pertumbuhan pasar • Pasar yang tidak masuk dalam segmentasi • Respon terhadap penjualan dan promosi yang tinggi • Perubahan teknologi • Perluasan areal produksi 	<p>Strategi S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan kinerja unit usaha yang ada dan merekrut produsen baru dalam koperasi • Lebih menitikberatkan pada kerja sama kemitraan dengan produsen sejenis dan koperasi • Mengadakan pelatihan pengembangan SDM • Diversifikasi produk 	<p>Strategi W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencoba teknologi baru dan menambah jumlah unit usaha • Memperlancar saluran distribusi pemasaran barang • Riset pemasaran untuk mencari celah-celah pemasaran yang belum dimanfaatkan • Standardisasi harga • Inovasi-inovasi baru • Memperluas areal produksi
<p>Ancaman (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inflasi • Pergantian musim • Resiko tinggi • Produk tidak tahan lama • Perubahan teknologi • Kenaikan harga bahan bakar • Pesaing dari Tawangmangu • Perubahan selera konsumen • Ancaman pendatang baru • Pesaing dari luar 	<p>Strategi S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan promosi gencar-gencaran agar dapat merebut hati konsumen • Melakukan penghematan biaya produksi karena fluktuasi harga produk • Pengenalan teknologi baru • Diversifikasi produk 	<p>Strategi W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan teknologi baru • Pemasaran lewat internet, brosur, dan pameran • Riset pemasaran melalui jasa konsultan pemasaran • Standardisasi harga

Sumber : Analisis Data Primer (2005)

Keterangan : S= Strength, W= Weakness, O=Opportunity, T=Threats

ANALISIS KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA SEKTOR PERTANIAN DI PROPINSI BENGKULU

Rudi Hartono dan Eko Priyotomo

(Staf Peneliti di BPTP Bengkulu)

ABSTRACT

Law No. 32/2004 on Regional Government and Law No.33/2004 on Intergovernmental Fiscal Relations are the basis of implementing fiscal decentralization, which may affecting the performance of regional economy. Objectives of research are to : (1) evaluate the implementation of fiscal decentralization; (2) analyze factors affecting regional fiscal receipt dan expenditure; (3) analyze factors affecting agriculture sector performance. This reaserch uses an econometric model of simultaneous equations system, and employs a set of pooled data (combination of yearly time series and district/city cross section). The model was estimated using the Two Stage Least Squares (2SLS). Locations of the research are Bengkulu Province include Bengkulu Selatan regency, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, and Bengkulu municipal. It is found that fiscal decentralization brought about an increase in the regional Government Revenue, which is dominantly affected by the Transferring Fund from the central to regional governments. On the expenditure side, the increase in proportion (allocation) of Routine Expenditure is higher than the increase in allocation of Development Expenditure was indicated by decrease in expenditures on Development Sector particularly of Agriculture. Own Regional Income (ORI, Pendapatan Asli Daerah), which mainly originated from Regional Taxes and Retributions, follows a positive trend, as shown by its ratios to Gross Regional Domestic Product (GRDP). However, the ORI's contribution to Regional Government Revenue tends to decrease. GRDP affects Regional Taxes Revenue, Regional Retributions and Tax Revenue Sharing positively. On the contrary, GRDP affects the Transfer Fund negatively. ORI, Transfer Fund, Number of Government Officials, and Regional Population affect the Routine Expenditure positively. Expenditures on Development Sector are affected positively by Regional Fiscal Revenue and negatively by Routine Expenditure. Implementation of fiscal decentralization affects both the Receipt and Expenditure sides of regional fiscal. On the Revenue side, there is a considerable increase in the Balancing Fund (Dana Perimbangan) and in ORI. In terms of share to the receipt, however, the former is up and the latter down. This suggests that fiscal decentralization causes more dependency of the regional government on the Ballancing Fund. Fiscal decentralization increases Receipt and Expenditure of the regional government, however, due to increases in Routine Expenditure, proportion of Development Expenditure Sector tends to be non-increasing. Regional Government Receipt (Taxes, Retribution, Revenue Sharing, and transfer) is dominantly affected by GRDP. The Balancing Fund is the main factor affecting Development Expenditures.

Key Words : Fiscal Decentralitation, Economyc Performance, Agriculture Performance

PENDAHULUAN

Paket kebijakan desentralisasi ekonomi (desentralisasi fiskal) yang tertuang dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1999 dan diperbaharui dalam UU nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah masih menjadi tekateki besar bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Desentralisasi ekonomi (desentralisasi

fiskal) mengatur wewenang daerah untuk melaksanakan pembelanjaan dan wewenang memungut pajak, artinya dengan desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah memiliki uang dan kekuasaan yang lebih besar dalam pembangunan daerahnya (Arifin, 2003).

Pembangunan pertanian dalam fase desentralisasi ekonomi dan pembangunan ekonomi regional harus diterjemahkan menjadi peningkatan basis

kemandirian daerah yang secara teoritis dan empiris mampu mengalirkan dan bahkan menciptakan dampak ganda aktivitas ekonomi lain di daerah. Otonomi daerah perlu diterjemahkan sebagai suatu kewenangan di daerah untuk lebih leluasa melakukan kombinasi strategis pemanfaatan suatu daerah otonomi, khususnya dalam rangka pembangunan pertanian.

Kebijakan desentralisasi fiskal telah memberi keleluasaan daerah untuk menentukan prioritas pembiayaan pembangunan dan peluang peningkatan jumlah dana pembangunan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan peningkatan penerimaan daerah, keleluasaan pemerintah daerah untuk membelanjakan dana alokasi yang diterima, dan kewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan mampu membuka peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, selanjutnya diharapkan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan potensi sumberdaya daerah dan potensi penerimaan fiskal yang dibagihasilkan diperkirakan berdampak negatif terhadap pemerataan pendapatan antar daerah (Bird dan Vaillancourt, 2000)

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memusatkan perhatian pada upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang dituangkan dalam Rencana Strategis pemerintah daerah tahun 2001-2005. Namun dalam percepatan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah menghadapi permasalahan antara lain : (1) Pendapatan Asli daerah (PAD) rendah serta pengeluaran daerah belum efektif; (2) jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan cukup banyak; (3) belum berkembangnya sistem dan jaringan lembaga UKMK dan rendahnya semangat wirausaha; (4) kurang tersedianya lapangan kerja yang cukup dan lemahnya kreatifitas tenaga kerja dalam berusaha; dan (5) letak geografis di bagian barat pulau Sumatera dan merupakan daerah

tertutup kurang diminati investor (Pem Prov, 2001 ; 2002).

Provinsi Bengkulu sebagai salah satu wilayah administrasi yang terdiri dari 8 Kabupaten dan Kota tidak terlepas dari dampak desentralisasi. Selama ini, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota memiliki ketergantungan fiskal yang sangat tinggi dan pendapatan per kapita yang relatif rendah. Perubahan kebijakan desentralisasi fiskal khususnya yang lebih menitikberatkan daerah Kabupaten dan Kota diperkirakan akan berpengaruh terhadap perekonomian regional di Provinsi Bengkulu seperti pertumbuhan PDRB Kabupaten, Kota, dan Provinsi; pemerataan pendapatan antar Kabupaten dan Kota; dan penyerapan tenaga kerja (BPS, 2005b).

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu cukup dominan dibandingkan oleh sektor-sektor lainnya. Hingga tahun 2002, sektor pertanian masih tetap menempati urutan teratas dalam struktur perekonomian Provinsi Bengkulu. Kontribusi sektor jasa dan transportasi - telekomunikasi sebesar 14,20 persen, menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Bengkulu belum maju. Sedangkan sektor lainnya seperti sewa rumah, pemerintahan dan sektor sosial lainnya hanya memberikan kontribusi sebesar 15,87 persen, hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Provinsi Bengkulu masih bergerak dari sektor primer. Meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin juga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk selalu berupaya memperkecil angka pengangguran dan kemiskinan (BPS, 2005b).

Data BPS (2005b) menunjukkan bahwa setelah implementasi desentralisasi fiskal ternyata alokasi dana pemerintah daerah untuk rutin jauh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran daerah untuk pembangunan. Hal ini terjadi akibat besarnya dana untuk gaji pegawai sebagai akibat pelimpahan pegawai pusat ke daerah serta besarnya pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembiayaan untuk legislatif dan eksekutif. Sedangkan

prosentase pengeluaran untuk infrastruktur setelah desentralisasi menurun dibandingkan dengan tahun 2000, disisi yang lain infrastruktur akan berpengaruh terhadap output, dan PBRB sektoral

Ketersediaan fiskal di daerah serta transfer pusat ke daerah sangat berpengaruh terhadap alokasi pengeluaran daerah termasuk pengeluaran sektor pertanian, dan

selanjutnya variabel-variabel tersebut akan berdampak terhadap perekonomian daerah. Yudhoyono (2004) menyimpulkan bahwa peningkatan alokasi dana untuk sektor pertanian dapat meningkatkan PDRB sektor pertanian dan mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan.

Kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu pasca krisis ekonomi 1998 meningkat cukup signifikan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Kinerja Perekonomian Provinsi Bengkulu Tahun 1999-2002

Tahun	PDRB atas Harga Berlaku (triliun rupiah)	PDRB atas Harga Konstan (triliun rupiah)
1999	4,04	1,68
2000	4,54	1,74
2001	5,18	1,81
2002	5,92	1,89

Tabel 1. menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dan semakin membaik yang ditunjukkan dengan nilai PDRB atas harga konstan yang selalu tumbuh positif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa di Provinsi Bengkulu telah mulai kembali berproduksi secara normal. Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi terjadi di semua sektor ekonomi, secara khusus sektor yang memberikan pertumbuhan di atas 4 persen terjadi di 6 (enam) sektor yaitu : sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik - gas - air minum, sektor perdagangan, dan sektor pengangkutan - komunikasi (BPS, 2005a).

Seiring dengan meningkatnya kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu pada kurun waktu 2000 - 2001 tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Bengkulu juga relatif mengalami peningkatan. Peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk terlihat dari peningkatan nilai nominal PDRB/kapita/tahun atas dasar harga berlaku maupun nilai riil PDRB/kapita/tahun atas harga konstan. Kondisi infrastruktur seperti sarana jalan dan transportasi yang semakin memadai akan mempercepat arus lalu lintas barang, modal, jasa, dan

manusia dari dan ke daerah lain sehingga roda kegiatan daerah menjadi dinamis dan berkembang. Fasilitas lain yang mendukung pembangunan daerah adalah peningkatan jaringan telepon, listrik dan PDAM. Kondisi sumberdaya alam yang dimiliki adalah : (1) luas lahan pertanian lahan kering 95,14%, lahan sawah 4,86%, (2) sumber mineral yang ada berupa bahan galian golongan A (strategis), golongan B (vital), dan golongan C (bahan bangunan dan industri), (3) cadangan minyak dan gas bumi, (4) sumberdaya hutan, dan (5) sumber daya kelautan seperti ikan, udang, kerang, rumput laut, dan sebagainya (BPS, 2005b).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di wilayah Propinsi Bengkulu yang terdiri dari kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 40 sampel yang merupakan *polled data* dari data primer 3 Kabupaten dan Kota serta data sekunder selama 10 tahun mulai tahun 1996 s/d 2005. Data sekunder lainnya diambil dari BPS, Biro Keuangan, dan instansi terkait lainnya di Provinsi Bengkulu mulai tahun 1996 s/d 2005.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan desentralisasi fiskal menurut UU No 32 tahun 2004 pada intinya merupakan pemisahan kewenangan urusan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang tercermin dari kedua sisi anggaran (fiskal) yaitu Penerimaan dan Pengeluaran. Pada sisi Penerimaan, yaitu kewenangan daerah yang lebih besar dalam menentukan kebijakan Pajak, Retribusi dan Penerimaan Daerah dari sumber lainnya. Kewenangan kebijakan Pajak dan Retribusi daerah merupakan kewenangan untuk menentukan jenis, basis, dan tarif dari pajak dan retribusi daerah serta alternatif sumber penerimaan daerah lainnya. Setelah desentralisasi fiskal terjadi perubahan struktur Dana Perimbangan Keuangan Daerah yaitu pada struktur Transfer Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Secara umum struktur penerimaan tiap-tiap daerah Kabupaten maupun Kota memiliki komponen penyusun yang relatif sama yang terdiri dari : (1) Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SLATL); (2) Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD); (3) Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan atau instansi lain yang lebih tinggi (Transfer); (4) Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah (PPD). Setelah desentralisasi fiskal, bagian Pendapatan yang berasal dari Transfer terdapat pos Subsidi Daerah Otonom dan Pos Bantuan Pembangunan digantikan dengan pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengeluaran Pemerintah Daerah dibagi atas Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. Pengeluaran Rutin mencakup : (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang; (3) Belanja Pemeliharaan; (4) Perjalanan Dinas; (5) Belanja lain-lain; (6) Angsuran Pinjaman dan Bunga; (7) Pensi6n dan Bantuan; (8) Ganjaran, Subsidi, dan Sumbangan; (9) pengeluaran yang tidak masuk Bagian Lain; dan (10) Pengeluaran Tak Terduga. Pengeluaran Pembangunan mencakup : (1) pengeluaran untuk berbagai Sektor Pembangunan; (2) Subsidi Pembangunan kepada Daerah

Bawahan; dan (3) Pembayaran Kembali Pinjaman.

Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Fiskal Daerah

Evaluasi pelaksanaan desentralisasi ini meliputi tiga hal yaitu : perkembangan Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Derajat/tingkat desentralisasi daerah. Untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih mendalam masing-masing penerimaan, pengeluaran, dan tingkat desentralisasi fiskal diuraikan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bengkulu.

Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam 10 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Dari (5) lima komponen Penerimaan Daerah, ternyata komponen Transfer/Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu masih tergantung pada Pemerintah Pusat.

Hal penting yang perlu dicatat bahwa komponen PAD dari tahun ke tahun secara nominal terus meningkat, namun persentasenya terhadap Total Penerimaan berfluktuasi. Tahun 1993 mengalami peningkatan sampai tahun 1999, dan tahun 2000 sampai 2003 persentasenya terus menurun. Secara rata-rata apabila dibandingkan dua kondisi sebelum dan setelah desentralisasi fiskal juga menurun, dari 4,37% menjadi 3,4%. Kondisi ini merupakan peluang bagi pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam otonomi daerah untuk menggali sumber Penerimaan Asli Daerah.

Komponen Transfer/Dana Perimbangan, secara nominal terus meningkat namun terhadap Total Penerimaan Daerah selalu turun, apabila dilihat secara rata-rata sebelum desentralisasi 92,18%, dan setelah desentralisasi turun menjadi 89,2%. Dua komponen terbesar pada dana Transfer, adalah Bantuan dari Pemerintah dan/Instansi yang lebih tinggi (SDO) atau DAU, dan Bantuan Pembangunan atau DAK masing-masing dana DAU sebesar

56,98% sebelum desentralisasi dan 81,80% setelah desentralisasi, sedangkan DAK sebesar 27,06% sebelum desentralisasi dan 1,83% setelah desentralisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan dana untuk pembangunan masih relatif kecil, demikian juga Pinjaman Pemerintah daerah masih relatif kecil yaitu sebesar 0,51% dari total Penerimaan Provinsi.

Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota.

Perkembangan Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi berbeda dengan Kabupaten/Kota, dimana pada tingkat Kabupaten/Kota terjadi peningkatan Penerimaan. Komponen PAD di Kota Bengkulu paling tinggi dibanding PAD tingkat Provinsi dan tiga Kabupaten lainnya, serta menunjukkan trend meningkat. Komponen PAD terbesar berasal dari Retribuis daerah. Secara rata-rata, komponen PAD Kota sebesar 9,97% dari Total Penerimaan Daerah, Rejang Lebong 3,78%, Bengkulu Selatan 2,05%, dan Bengkulu Utara 1,99%. Setelah Desentralisasi besarnya presentase PAD justru turun berarti kebijakan desentralisasi fiskal yang diberlakukan di Kota Bengkulu, dan dua Kabupaten justru menurunkan presentase rata-rata PAD terhadap Total Penerimaan Daerah, sedangkan kebijakan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bengkulu Utara meningkatkan rata-rata presentase PAD. Kebijakan desentralisasi fiskal juga menurunkan komponen Bagi Hasil khususnya Bagi Hasil Pajak di Kabupaten dan Kota.

Sumbangan dan Bantuan merupakan Transfer Pemerintah Pusat yang paling besar dalam Penerimaan Daerah Kabupaten/ Kota dibandingkan dengan Transfer pusat berupa Bagi Hasil Pajak. Tujuan Pemerintah Pusat memberikan sumbangan ini agar daerah sanggup membiayai kebutuhan fiskal. Sebelum desentralisasi fiskal dana tersebut diberikan berupa Sumbangan Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan bantuan Dana Pembangunan (BP), setelah desentralisasi berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Kontingensi.

Apabila dilihat dari rata-ratanya, komponen Transfer masih mendominasi perekonomian daerah Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 81,71% dari total penerimaan daerah Kota, 95,61% Kabupaten Bengkulu Selatan, 91,4% Kabupaten Rejang Lebong, dan 95,54% Kabupaten Bengkulu Utara. Komponen transfer di Kabupaten/Kota masih didominasi dari DAU dan DAK. Kondisi setelah desentralisasi fiskal komponen DAU mengalami peningkatan yang cukup tinggi namun sebaliknya komponen DAK mengalami penurunan yang cukup besar juga. Dilihat dari besarnya sumbangan DAU Kota Bengkulu paling kecil dibanding tiga Kabupaten lainnya, hal ini menunjukkan bahwa di tiga Kabupaten pembiayaan kebutuhan fiskal daerah masih tergantung pada bantuan pusat berupa DAU.

Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi di daerahnya. Seperti halnya pada penerimaan, pengeluaran pemerintah daerah juga dilihat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

Perkembangan Pengeluaran Rutin (G Rutin) Provinsi Bengkulu menunjukkan trend meningkat setiap tahun. Penggunaan Anggaran pemerintah terbesar digunakan untuk Belanja Pegawai diikuti Belanja Barang dan Belanja lain-lain. Besarnya anggaran secara nominal semakin besar, namun dilihat dari prosentase terhadap total G Rutin dari tahun ke tahun menunjukkan trend menurun. Demikian juga dari rata-rata kondisi sebelum desentralisasi Belanja Pegawai mencapai 84,24%, dan setelah desentralisasi turun menjadi 80,06%. Peningkatan besarnya pengeluaran daerah untuk Belanja Pegawai setelah desentralisasi meningkat cukup besar, hal ini terjadi akibat

terjadinya pelimpahan pegawai pusat ke daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pengeluaran pembangunan pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa Pengeluaran Pembangunan untuk Sektor Ekonomi menunjukkan trend meningkat dari tahun ketahun kecuali sektor industri. Sektor infrastruktur mengalami peningkatan yang cukup besar dari 7,25% tahun 1993 menjadi 52,16% tahun 2000 dari total G Pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu sedang memperlengkapi sarana dan prasarana pembangunan daerah. Namun kebijakan desentralisasi fiskal mempengaruhi kebijakan keuangan daerah yaitu menurunkan Pengeluaran Pembangunan untuk Infrastruktur. Pengeluaran pembangunan untuk sektor-sektor produktif yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi justru prosentasenya relatif kecil dibanding sektor-sektor lainnya, sebagai contoh Pengeluaran Pembangunan Sektor Pertanian setiap tahun mengalami peningkatan dari 2,48% menjadi 6,85% setelah desentralisasi, namun dilihat dari presentase peningkatan Penerimaan Daerah ataupun Pengeluaran Pembangunan masih relatif kecil.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Bengkulu juga berdampak pada Pengeluaran Pembangunan setiap sektor mengalami peningkatan, namun Sektor Kehutanan dan Infrastruktur menurun dari 1,28% menjadi 0,29% pada Sektor Kehutanan dan Infrastruktur 45,84% menjadi 39,09% dari total G Pembangunan. Disamping itu, kebijakan desentralisasi fiskal juga berpengaruh pada meningkatnya Pengeluaran Pembangunan Lain-lain. Sektor Pariwisata di provinsi Bengkulu sudah mulai mendapat perhatian pemerintah daerah, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya presentase pengeluaran pembangunan di Sektor Pariwisata mengalami peningkatan dari 1,06% menjadi 1,34% dari total Pengeluaran Pembangunan.

Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan perkembangan Pengeluaran Rutin Provinsi yang selalu meningkat, maka Pengeluaran Rutin daerah Kabupaten.Kota juga selalu mengalami peningkatan. Besarnya pengeluaran untuk Belanja Pegawai juga masih mendominasi Pengeluaran Rutin Daerah. Hal yang menarik disampaikan bahwa setelah desentralisasi fiskal, kebijakan pengeluaran daerah Kota berbeda dengan tiga Kabupaten lainnya, yaitu Belanja Pegawai Kota Bengkulu meningkat dari 73,49% menjadi 82,11% sedangkan di tiga Kabupaten mengalami penurunan yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dari 86,24% menjadi 77,61%, Rejang Lebong dari 84,16% menjadi 83,11%, dan Bengkulu Utara dari 86,63% menjadi 78,54%. Demikian halnya untuk Belanja Barang di Kota mengalami penurunan dari 15,94% menjadi 7,87%, dan di tiga Kabupaten lainnya justru mengalami peningkatan.

Kebijakan desentralisasi fiskal juga berdampak pada kemampuan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam membayar Angsuran Pinjaman. Hal ini terlihat dari menurunnya presentase jumlah pengeluaran Daerah Kota Bengkulu dan tiga Kabupaten lainnya untuk mengangsur pinjamannya. Dukungan anggaran untuk sector Pariwisata setelah desentralisasi fiskal di Kabupaten justru mengalami penurunan, namun di Kota Bengkulu mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Bengkulu pariwisata sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, dan ditunjang adanya jumlah objek wisata yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tiga Kabupaten lainnya.

Analisis Tingkat / Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi suatu daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap Total Pengeluaran (Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan) masing masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Semakin tinggi rasio PAD terhadap Total Pengeluaran, berarti semakin baik derajat

desentralisasi fiskal daerah tersebut, dengan kata lain semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya semakin kecil rasio PAD terhadap Total Pengeluaran berarti semakin rendah derajat desentralisasi fiskal daerah,

dengan kata lain semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pelaksanaan pelayanan umum dan pemerintahan.

Tabel 2. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 1993-2003.

Pemerintah Daerah	Rasio PAD terhadap TGD	
	Sebelum Desentralisasi Fiskal	Setelah Desentralisasi Fiskal
Provinsi	0,045	0,036
Bengkulu Selatan	0,021	0,023
Rejang Lebong	0,039	0,032
Bengkulu Utara	0,020	0,030
Kota Bengkulu	0,087	0,047

Sumber : Data APBD Provinsi/Kabupaten/Kota (diolah)

Tabel 2. menggambarkan perkembangan derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebelum dan setelah desentralisasi fiskal. Data tabel menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum desentralisasi fiskal paling tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya dan Provinsi, yang berarti bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah daerah kepada pemerintah Pusat makin rendah,

Data di atas juga menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Rejang Lebong menurunkan tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah, yang berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat makin tinggi. Sebaliknya Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat semakin kecil.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Pada persamaan yang disusun ada empat sumber penerimaan daerah yang diberlakukan sebagai variabel kebijakan (*policy exogenous variable*) yaitu Dana

Alokasi Umum (DAU), Bagi Hasil Pajak (BHPT), Bagi Hasil Bukan Pajak (BHNTX), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga keempat variable tersebut tidak berupa persamaan struktural. Kinerja Perekonomian Daerah terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Desempatan Kerja (TTKD), dan Distribusi Pendapatan. Berikut diuraikan perilaku pengeluaran, penerimaan, dan kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil estimasi model/persamaan menggunakan program komputer SAS.6.12.

1. Pengeluaran Rutin Daerah
Pengeluaran Rutin daerah (GRTN) Provinsi Bengkulu dipengaruhi secara positif oleh Dana Transfer Pusat (TRNF) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama periode tahun penelitian terjadi trend peningkatan Pengeluaran Rutin Daerah (GRTN).
2. Pengeluaran Pembangunan
Pengeluaran Pembangunan Daerah (GPMBG) dipengaruhi secara positif dan significant oleh TRNF, Jumlah populasi penduduk (POPP), dan Luas Daerah (LD). Sama halnya dengan GRTN, maka GPMBG juga mengalami trend yang positif selama periode tahun penelitian.
3. Penerimaan Pajak, Retribusi

Penerimaan Pajak Daerah (TXD) dan Retribusi Daerah (RET) secara positif dan significant dipengaruhi oleh Tingkat Perekonomian Daerah (PDRB), dan Pajak daerah mengalami trend yang positif sepanjang tahun penelitian

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB secara positif dan significant dipengaruhi oleh Total Pengeluaran Daerah (TGD), Jumlah orang bekerja (TTKD), dan Investasi Daerah (INVE)

5. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan (YD) dipengaruhi secara positif dan significant oleh PDRB, tetapi perkembangan tingkat perekonomian daerah tidak memperbaiki distribusi pendapatan. Sedangkan peningkatan dana TRNF, INVE, dan tingkat upah (UMP) akan memperbaiki distribusi pendapatan.

6. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja (TTKD) secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh PDRB dan TRNF, tetapi secara negatif dan signifikan dipengaruhi tingkat upah. Ini berarti bahwa kenaikan upah akan mengurangi permintaan tenaga kerja di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskripsi dan analisis yang diperoleh, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap sisi penerimaan dan pengeluaran fiskal daerah. Pada sisi penerimaan terjadi peningkatan yang tinggi dari sumber dana transfer/dana perimbangan, tetapi PAD cenderung menurun. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal menyebabkan semakin tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan.
2. Desentralisasi fiskal meningkatkan penerimaan dan pengeluaran daerah tetapi alokasi (proporsi) dana pengeluaran sektor-sektor pembangunan belum menunjukkan

peningkatan sebagai akibat meningkatnya alokasi pengeluaran rutin.

3. Penerimaan daerah (pajak, retribusi, bagi hasil, transfer) secara dominan dipengaruhi oleh PDRB. Dana perimbangan merupakan faktor yang mempengaruhi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sejalan ini faktor yang dominan mempengaruhi pengeluaran pembangunan sektor-sektor ekonomi adalah penerimaan daerah dan pengeluaran rutin.
4. Peningkatan pajak daerah akan menurunkan investasi daerah, tetapi pengeluaran pembangunan sektor ekonomi akan meningkatkan investasi daerah
5. Tingkat perekonomian (PDRB) dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah, penyerapan tenaga kerja, dan investasi, sebaliknya distribusi pendapatan daerah dipengaruhi oleh PDRB, dana perimbangan, dan investasi daerah.
6. Kebijakan fiskal ekspansif mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya aktifitas Pertanian (PDRB) Sektor pertanian.
7. Peningkatan alokasi dana pembangunan untuk subsektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sangat mendorong aktifitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. 2003. *Dekomposisi Pembangunan Pertanian Indonesia Era Desentralisasi*. Makalah Seminar Bulanan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Bogor.
- Bird, R.M. dan F.Vaillancourt. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Terjemahan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- BPS. 2005a. *Bengkulu Dalam Angka 2004*. Badan Pusat Statistik Propinsi Bengkulu, Bengkulu

BPS. 2005b. *Statistik Keuangan Pemerintah Propinsi Bengkulu 2004*. Badan Pusat Statistik Propinsi Bengkulu, Bengkulu

Gujarati, D. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga, Jakarta.

Musgrave, R.A. and P.B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Forth Edition. McGraw-Hill Book Company, New York.

Pemerintah Propinsi Bengkulu. 2002. *Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Bengkulu tahun 2001 - 2005*. Pemerintah Propinsi Bengkulu, Bengkulu.

-----, 2001. *Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu No.34 Tahun 2001 Seri "D", tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Bengkulu Tahun 2001-2005*. Pemerintah Propinsi Bengkulu, Bengkulu.

Sinaga, B.M. dan H. Siregar. 2003. *Laporan Akhir : Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Sukirno, S. 2000. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi kedua. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yudhoyono, S.B. 2004. *Kebijakan Fiskal Indonesia*. Brighten Press, Bogor.